

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia perkembangan sektor publik semakin pesat hal ini juga didukung dengan adanya tuntutan globalisasi yang mengharumkan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian daerah yaitu melalui otonomi daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan suatu penataan sistem akuntansi yang baik dengan pemanfaatan sistem informasi yang baik juga, karena hal tersebut merupakan pendukung terciptanya kualitas pelaporan keuangan daerah yang *accountable*, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparansi, efisien, efektif, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintah daerah, upaya untuk pertanggung jawaban atas wewenang yang diberikan yaitu dengan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus sesuai dengan kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintahan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dengan menerapkan kriteria tersebut dalam laporan keuangan yang disajikan

berarti pemerintah daerah dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, apabila informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah telah memenuhi kriteria karakteristik yang ditetapkan maka pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan, apabila tidak sesuai maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakefisien dan tidak efektifan (Sukmaningrum, 2012).

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem informasi menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi saat ini. pemerintah telah memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan suatu sistem informasi, sebagai wadah untuk menyediakan informasi mengenai keuangan daerah yang dapat diakses dikelola dan digunakan oleh berbagai pihak dan masyarakat luas.

Terlepas dari kontroversi dan kelemahan yang sangat mendasar, salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diterima secara umum. Berdasarkan hal tersebut

faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah penerapan SAP dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah.

Menurut Mahmudi (2016:02-03) Kualitas Laporan Keuangan Daerah Salah satu pilar utama tegaknya perekonomian suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari pemangku kekuasaan. Istilah lain dari akuntabilitas tersebut “amanah” yang berarti pemangku kekuasaan yang akuntabel atau amanah adalah mereka yang terpercaya dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya. Setiap Rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan.

Tabel 1.1
Hasil Pemeriksaan Audit

Tahun	Hasil Audit LKPD OKU
2014	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena adanya penatausahaan aset tetap yang belum memadai dan aset lainnya yang tidak dapat diyakini keawajarannya.
2015	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melakukan upaya perbaikan dengan menelusuri dan memperoleh dokumen pendukung atas penyajian nilai aset tetap dan lainnya dan melaksanakan perbaikan atas penyajian nilai aset tetap dan lainnya serta telah melakukan koreksi-koreksi yang diperlukan sehingga penyajian laporan keuangan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Atas perbaikan dan penyajian tersebut, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering telah melakukan koreksi atas aset tetap dan aset lainnya pada neraca per 31 Desember 2014. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak melakukan <i>restatement</i> atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014.
	Kemudian pada tahun 2016-2019 opini BPK atas LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu mencetak prestasi yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak lima kali berturut-turut. Pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

2016-2019	tersebut karena LKPD Kabupaten OKU telah memperhatikan kesesuaian SAP. Kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Namun, sampai kini penyajian laporan keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Kenyataan ini telah ditemukan oleh BPK-RI melalui suatu sistem auditnya.
-----------	--

Berdasarkan hasil audit BPKP Kabupaten Ogan Komering Ulu terhadap LKPD untuk kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2014 mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), karena adanya penatausahaan aset tetap yang belum memadai dan aset lainnya yang tidak dapat diyakini keawajarannya. Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan perbaikan sehingga penyajian laporan keuangan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil audit BPKP Kabupaten Ogan Komering Ulu laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2016-2019 menyimpulkan bahwa ada peningkatan kualitas LKPD setiap tahunnya hal ini di dukung mencetak prestasi yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak lima kali berturut-turut. Hal ini membuktikan adanya keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah. Peneliti tertarik mengkaji lebih dalam factor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Melihat hasil audit bahwa Kabupaten Ogan Komring Ulu selama lima tahun berturut-turut memperoleh opini WTP, hal ini tentunya dipengaruhi berbagai factor yang sangat menarik untuk diteliti lebih jauh.

Fenomena yang terjadi yaitu rekonsiliasi dan monitoring evaluasi aset kontraktor kerjasama. Permasalahan kerjasama pemerintah daerah dengan pemodal/dana usaha untuk pemanfaatan aset daerah. Dengan dalih kerjasama untuk mendapatkan keuntungan agar ada pembagian pemerintah daerah atas pemanfaatan dan pengelolaan aset tersebut. Namun pada kenyataannya aset pemerintah daerah tergerus habis oleh karena jangka waktu kerjasama terlalu panjang. Lambat lajut aset tersebut dikuasai oleh pihak ketiga, pemerintah dengan periode berikutnya kehilangan jejak untuk menelusuri keberadaan aset daerah tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam pengelolaan aset daerah karena pemerintah lebih terfokus dengan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015-2019”**. (Studi Kasus Di Kantor BKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah (Studi Kasus BKAD OKU Tahun 2015-2019) Secara Parsial maupun Simultan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah (Studi Kasus BKAD OKU Tahun 2015-2019) Secara Parsial maupun Simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain, terlebih lagi untuk perkembangan ilmu pengetahuan untuk itu yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.2 Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk pengembangan ilmu, yakni memberikan wawasan serta dapat digunakan sebagai landasan dan bahan pertimbangan untuk melakukan pengembangan penelitian selanjutnya yang sama bagi semua pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dapat menjadi tolak ukur bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah khususnya laporan keuangan pemerintah daerah.